

Dinas Sosial Banjarmasin akan Coret 3 Ribu Nama Penerima Bansos, DPRD Minta Klarifikasi



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/04/04/dinas-sosial-banjarmasin-akan-coret-3-ribu-nama-penerima-bansos-dprd-minta-klarifikasi>

Anggota DPRD Kota Banjarmasin akan melakukan pertemuan dengan Dinas Sosial. Agenda yang akan dibahas, di antaranya adalah meminta klarifikasi terkait 3 ribu nama Kepala Keluarga penerima bansos dihapuskan.

Hal ini dikatakan Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Mathari.

Penghapusan nama dan data tersebut dikarenakan tidak terverifikasi dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Dolly Syahbana mengatakan, jumlah penerima Bansos di Banjarmasin ada 8.000 KK.

"Mereka masuk dalam kategori miskin ekstrim di Kota Banjarmasin pada tahun 2022 lalu," jelasnya kepada Smart FM Banjarmasin.

Dolly menerangkan, setelah pihaknya menyandingkan dengan DTKS, hanya 5.000 KK diantaranya yang berhak menerima Bansos.

"3.000 KK sisanya ada yang NIK ganda dan tanpa NIK," jelasnya.

Terpisah. Rencana penghapusan ribuan KK dari daftar penerima Bansos ini turut ditanggapi oleh jajaran legislatif.

Rencananya, DPRD Kota Banjarmasin akan menggelar rapat bersama Dinas Sosial Kota Banjarmasin pada Kamis, (06/3) mendatang.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Mathari menyatakan, selain membahas terkait pertanggungjawaban Wali kota Banjarmasin, pihaknya juga bakal meminta klarifikasi terkait 3.000 ribu KK penerima bansos yang akan dicoret.

"Nanti akan kami klarifikasi terlebih dahulu nama-nama ini dan alasan pencoretan," pungkasnya.

Ia menerangkan, klaim penurunan warga miskin ekstrim dari 8.000 menjadi 5.0000 KK tidak bisa cuma mengacu pada data satu instansi saja.

"Datanya harus benar-benar diluruskan dulu dengan semua SKPD dan lembaga terkait lain," ujarnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu membandingkan, bahwa pemko sering membeberkan ke publik adanya penurunan angka kemiskinan.

Tapi, anggaran bantuan untuk warga miskin di APBD justru tetap tinggi. Tentunya hal ini menunjukkan ada yang tidak beres.

"Syukur-syukur kalau data itu benar. Kita lihat saja nanti," tutupnya.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/04/04/dinas-sosial-banjarmasin-akan-coret-3-ribu-nama-penerima-bansos-dprd-minta-klarifikasi>, 4 April 2023.
2. <https://www.sonora.id/read/423750149/ribuan-warga-banjarmasin-dicoret-dari-penerima-bansos-ini-alasannya>, 4 April 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Belanja Bantuan Sosial

- 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - (1) rehabilitasi sosial
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - (2) perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - (3) pemberdayaan sosial

ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4) jaminan sosial

merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) penanggulangan kemiskinan.

merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) penanggulangan bencana

merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

- 17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- 18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- 19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.